BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Hulu Sungai Utara

Residen Koordinator Kalimantan Selatan yaitu Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan yang mengucapkan pelantikan kepada para anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang tersebut. Sehingga hal tersebut merupakan suatu peristiwa berdirinya Kabupaten Amuntai secara resmi dan tertanggal pada tanggal 1 Mei 1952.

Pada perkembangan wilayah serta sistem pemerintahan, maka Kabupaten Amuntai berubah nama menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga sekarang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Setelah itu beberapa tahun kemudian pada tanggal 4 April 2002 terbit SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0110 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Pertimbangan Pemekaran Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan diiringi SK DPRD Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang persetujuan terbentuknya Kabupaten Balangan yang memisahkan diri dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah pertimbangan-pertimbangan mengenai pemekaran tersebut, maka pada tanggal 8 April 2003 dilantik Bupati dari Balangan yang pertama oleh

Gubernur Kalimantan Selatan. Setelah resminya Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara berpisah dengan seiring waktu maka terjadilah krisis ekonomi bagi kehidupan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana sekarang merupakan menjadi Kabupaten tertinggal dalam bidang ekonomi, karena sumber daya alam dan yang lainnya biasanya bersama Kabupaten Balangan, dan sekarang tidak, karena pada dasarnya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Balangan lebih banyak dibandingkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diantaranya adalah yang berpotensi di Kabupaten Balangan adalah Peternakan, Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan serta banyak objek wisata yang ada di Kabupaten tersebut. sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanyalah lebih kepada Peternakan, Pertanian dan Pariwisata yaitu candi agung.

2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif). Guna mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Hulu Sungai Utara juga mempunyai misi, yaitu:

a. Menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif;
b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan ditepang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah;
c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumber daya lokal dengan berlandaskan potensi daerah;

d. Membangun infrastruktur daerah yang terintegritas dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal;
e. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

B. Penyajian Data

1. Identitas dan Deskripsi Tentang Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Bidaya dan Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, Staff dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Perikanan, maka diketahui dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan suatu pengaruh besar terhadap pemimpin guna dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada, berikut upaya yang dilakukan pemimpin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber daya alam:

a. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1) Identitas Informan Pertama

Nama : Drs. H. Sofian Syahrani, M. Si

Umur : 53 Tahun

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pendidikan Terakhir : S2 UB

Alamat : Jl. H. Saberan Effendi RT. 3 No. 66 Amuntai

2) Penjelasan Informan Pertama

Menurut informan, kumpulan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bagian Hukum yang terkait tentang pengelolaan sumber daya alam ada, akan tetapi lebih kepada retribusi penjualan produk daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mana hal tersebut dimasukkan dalam ringkasan rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun anggaran 2019. Adapun peraturan terbaru pada Tahun 2018 yang tercatat didalam katalog bagian hukum yaitu peraturan tentang pedoman pembentukan peraturan daerah, pencabutan atas peraturan daerah kebupaten hulu sungai utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, penyertaan modal pemerintah kabupaten hulu sungai utara kepada PDAM Kabupaten Hulu sungai utara Tahun anggara 2018-2019, penyelenggaraan kabupaten layak anak, rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018. Sedangkan peraturan yang lain langsung dibuat oleh dinas terkait dalam bidang tugasnya. Bagian hukum merupakan suatu tempat penyaringan

peraturan untuk mengetahui Peraturan tersebut masih bisa dipakai atau sudah dicabut sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri.

Program kerja dari bagian hukum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya adalah mengadakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik itu antar dinas dalam daerah ataupun luar daerah, penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait sumber daya alam seperti perikanan ataupun yang lainnya, dan kerjasama soialisasi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam.[1]

b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara

1). Nama : Yati

Jabatan : Kesekretariatan

2). Jawaban Informan Kedua

Menurut Informan, tidak ada Pendapatan Asli Daerah menyangkut Sumber Daya Alam yang dikelola, untuk kehutanan kebijakan diambil alih oleh Provinsi dan perkebunan diambil alih oleh dinas pertanian, akan tetapi pendapatan asli daerah hanya menangani IMB dan pelayanan sampah, upaya dari Dinas ini untuk kedepan yaitu dalam bidang air minum yang merupakan salah satu sumber daya alam Daerah,

[1] H. Sofian Syahrani, Kepala Bagian Hukum, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, Senin, 31 Desember 2018, 11.33.

namun laboratorium yang dibuat baru terbentuk dan belum terkelola serta tidak ada peraturan yang mengatur.[2]

b. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

1). Informan Ketiga

Nama : H. Fajeri Ripani, S. Sos, M. Si

Umur : 57 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pendidikan Terakhir : S2 UB

Alamat : Jl. H. Hamidan Ds. Sei Karias Kompl. Stadion

2). Jawaban Informan Ketiga

Menurut informan, Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu candi agung, kerbau rawa, mesjid dan makam yang merupakan suatu kepercayaan orang sehingga menjadi suatu tempat berkunjung (wisata religi) seperti masjid sungai banar, makam sulaiman yaitu satu badan dua kubur dan yang lainnya. Namun didalam penelitian adalah hal yang menunjang dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkelola dengan baik yaitu candi agung hingga sekarang, pendapatan asli daerah yaitu melalui karcis

[2] Ibu Yati, Bagian Kesekretariatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, *Berbincang-bincang,* Amuntai, Rabu, 26 Desember 2018, 15.23.

yang biasanya dibayar oleh setiap pengunjung. Untuk orang dewasa itu Rp. 4.000,00 dan untuk anak-anak itu Rp. 3.000,00, karena kerbau rawa belum dapat dikelola dengan baik sehingga tidak ada pungutan untuk berkunjung masuk kesana.

Candi agung merupakan suatu tempat pariwisata yang sering dikunjungi karena banyaknya sejarah yang telah ada pada masa dulu. Adapun peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam terkhususkan untuk candi agung tidak ada, akan tetapi semua itu masuk pada program kerja guna upaya yang akan dilakukan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Program kerjanya antara lain Program pengembangan pemasaran pariwisata khususnya juga candi agung yang mana hal itu dilaksanakan oleh Kasi Promosi Pariwisata Bpa Fahruraji, SE, Program pengelolaan dan pengembangan pelestarian, program pengelolaan peninggalan sejarah purbakala, dan program pengembangan kemitraan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Guna tercapainya program tersebut, maka depala Dinas mempunyai upaya-upaya untuk pariwisata candi agung guna dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih baik ditahun 2019 dan seterusnya, antara lain seperti kedisiplinannya para petugas candi, berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai anggaran, dan adanya perubahan-perubahan yang aka dilakukan seperti perluasan tempat parkir disamping kios-kios cenderamata, perpindahan

pintu masuk, perluasan jalan didalam tempat pariwisata candi agung, yang biasanya hanya jalan setapak untuk jalan kaki, maka disitu mereka akan membuat jalan lebih lebar, agar disana bisa memakai becak untuk berkeliling-keliling melihat-lihat situs-situs candi, dan juga dinas ini bisa melibatkan sekaligus membantu para swasta becak dalam transportasi becak, bisa juga permainan transportasi anak seperti kereta api mini guna berkeliling menyusuri danau atau situs candi yang mau dituju, dan di dinas ini juga akan melakukan adanya sanksi apabila ada yang tidak jujur masuk dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.[3]

c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1). Identitas Informan keempat

Nama : Ir. Ismarlita

Umur : 52 Tahun

Jabatan :Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pendidikan Terakhir : S1 Perikanan

Alamat :Kompl. CPS RT. 20 No. 32 Sei Malang Amuntai

2). Jawaban Informan Keempat

Menurut informan, Perikanan adalah salah satu sumber daya alam yang berpotensi di Hulu Sungai Utara. Adapun peraturan yang

[3] H. Fajeri Ripani, S. Sos, M. Si, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, Senin, 31 Desember 2018, 10.01.

berkaitan tentang pengelolaan sumber daya alam terkhususkan perikanan termasuk pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang struktur, fungsi dan tugas yang mana semuanya merupakan dari tanggung jawab oleh Kepala Dinas, dan Kepala Dinas menjalankan tugas guna dalam memelihara pengelolaan sumber perikanan agar pendapatannya menjadi lebih baik dan mencapai target. Sedangkan target yang telah dicapai dari Dinas Perikanan pada tahun ini telah melebihi target sekitar 125 Juta, adapun dalam sistem pengelolaan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara tingkat Provinsi menduduki peringkat satu, dan tingkat Nasional dari segi pengelolaan dari tujuh peringkat, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara menduduki peringkat dua.

Program kerja dinas perikanan ditahun 2019 antara lain program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, program pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, Pprogram pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan, program penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta program optimalisasi usaha perikanan.

Adapun upayanya antara lain akan mengadakan pengadaan obat-obatan dan sosialilasi terkait hama penyakit ikan guna meminimalisir banyaknya kematian ikan, melakukan pengembangan perbenihan ikan, pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan, meningkatkan teknologi perikanan dan

mengusahakan untuk memaksimalkan bagi para nelayan dalam membantu bidang sarana prasana, contoh seperti karamba dal lain sebagainya, pembangunan tempat balai benih ikan untuk kontribusi pendapatan asli daerah yang bertempat di Banjang dan Gudang dingin dan pemasaran ikan ada dua unit buat pasca panen ikan sebagai sarana pemasaran dinas perikanan yang ada di Alabio, adapun target dari kinerja untuk mengupayakan pendapatan asli daerah melalui peningkatan bidang produksi perikanan tangkap dan peningkatan bidang produksi budidaya. Jadi, dari perikanan tangkap bertempat di Alabio adalah tempat yang sentral pemasaran sehingga gudang dingin dibangun disana. Dengan adanya gudang dingin maka dinas perikanan berupaya untuk menjaga stok ketahanan pangan Dinas di bidang perikanan dalam segi harga. Pada masa saat musim tertentu dimana hasil perikanan tangkap melimpah dan secara otomatis harga jual ikan tentunya pasti murah, oleh karena itulah bergunanya gudang dingin yang baru dinas perikanan bangun guna penampungan ikan untuk dijadikan ikan kering dan agar harga tetap stabil untuk pendapatan masyarakat. Setelah harga sudah stabil atau mahal, maka bisalah dijual dan keuntungan dari Dinas Perikanan mendapatkan PAD juga yang mana dihitungnya perkilo dalam setiap bulan saat orang menampung ikan di gudang, dan disitulah keuntungan dinas perikanan sebagai pusat pemasaran baik itu dari luar daerah juga bisa mencari atau juga bisa dari luar untuk menjualnya di gudang guna untuk penampungan dan

menaikkan harga. Sedangkan balai benih ikan yaitu penghasilannya musiman, karena daerah Hulu Sungai Utara bukan daerah irigasi, sehingga saat adanya kemarau panjang, maka istirahat tempat itu tidak ada lagi yang menampung, karena pada umumnya, balai benih ikan hanya bisa untuk beberapa hari dan setelah itu bisa langsung ditampung ke Gudang dingin ikan serta pengoptimalan dari sumber daya manusia yang dibagi dalam beberapa bidang pembinaan kelompok bagi para nelayan, bantuan-bantuan sarana prasarana. Adapun kelompok-kelompoknya, seperti kelompok budidaya, perikanan tangkap, hasil pengolahan dan pemasaran dan kelmpok pengawas pelestarian sumber daya alam perikanan.[4]

3. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

1). Identitas Informan Kelima

Nama	: Ir. Yuli Hertawan
Umur	: 54 Tahun
Jabatan	:Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	:Jl. Kompl. Blok f No. 45 Sungai Malang Amuntai

[4] Ir. Ismarlita, M. Si, Kepala Dinas Perikanan, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, Senin, 7 Januari 2018, 10.40.

2). Jawaban Informan Kelima

Menurut Informan, dinas pertanian membidangi 5 bidang satu sekertaris, bidang penyuluhan, bidang perkebunan dan holtikultura, bidang kesehatan hewan dan bidang tanaman pangan dan bidang prasarana dan sarana pertanian.

Program kerja yang terkait sumber daya alam daerah hulu sungai utara terkait peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan seperti sarana lahan dan air irigasi pertanian, penyediaan dan penyaluran pupuk serta pestisida, alat dan mesin pertanian, program pelayanan pembiayaan dan investasi pertanian, program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan seperti pengembangan intensifikasi tanaman pangan, pengembangan perbenihan tanaman pangan, pengembangan kelembagaan perbenihan tanaman pangan, perlindungan dan pengendalian tanaman pangan dari serangan organisme pengganggu tanaman, peningkatan mutu tanaman pangan, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Program peningkatan produksi hasil peternakan seperti pengembangan pembibitan pakan ternak, pengelolaan dan pendistribusian produksi ternak, Program peningkatan kesehatan hewan seperti peningkatan dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat, pengamatan penyakit hewan dan ternak, Program peningkatan produksi dan produktivitas tenaman perkebunan dan holtikultura seperti pengembangan dan

pengelolaan tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan dan holtikultura dan terakhir adalah program peningkatan dan pemberdayaan penyuluhan pertanian seperti peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana penyuluhan dari pertanian, peningkatan dan pengembangan lembaga penyuluhan dan pertanian dan peningkatan dan pengembangan lembaga petani.

Secara umum upaya dalam peningkatan sumber daya alam guna pendapatan asli daerah yaitu untuk meningkatkan usaha pertanian rakyat. Maksudnya baik itu sarana dan prasarana, pembinaan ilmu pengetahuan seperti adanya penyuluhan kepada masyarakat, membantu dalam permodalan kredit ke Bank. Karena semua itu merupakan usaha tani yang memerlukan usaha modal, jelas memerlukan keterampilan, jelas juga memerlukan arahan dari para petugas dinas pertanian. Dinas pertanian mendapatkan modal maka mereka adakan sosialisasi yang mana juga bekerjasama dengan Bank. Sehingga dengan adanya upaya tersebut mereka berharap dengan meningkatnya modal usaha itu akan meningkat pula pendapatan asli daerah dinas pertanian dengan hasil dari masyarakat daerah. Kemudian untuk kebijakan dari dinas pertanian lebih kepada pembinaan dibidang teknis melalui penyuluhan. Dalam penyuluhan dinas ini menyebar orang-orang dinas pertanian ditiap-tiap perkecamatan guna membimbing masyarakat Daerah untuk bertani yang baik, untuk jumlah penyuluh tersebar sebanyak 107 orang, berkebun yang baik dan beternak yang baik dalam sehari-hari, dan

untuk nama tempat bagi penyulu itu bernama Balai Penyuluh Pertanian, dalam seminggu juga mendapatkan penyuluhan dari Balai penyuluh pertanian Kabupaten untuk diberikan bimbingan untuk usaha pertanian buat dibawa ke kecamatan-kecamatan. Kepala dinas pertanian berharap dengan pembinaan teknis usaha petani ini lebih efisien, karena petani-petani itu minsednya yang penting asal tumbuh dan asal bisa panen, tidak memikirkan berapa keuntungan yang didapatkan, padahal harapan dari Dinas Pertanian misalnya ada 2 belig maka hasil panennya bisa mencapai 8 sampai 10 belig dengan tawaran sarana yang mereka tawarkan. Sarana prasarananya nanti yang akan mereka lakukan juga buat para petani, itu akan dibuatkan jalan usaha tani, gunanya untuk menuju tempat mereka bertani guna lebih teratur dan tidak sampai menginjak tanaman lagi hingga ada tanaman yang rusak. Bisa juga mereka membantu dengan bibit padi, pupuk dan yang lainnya.[5]

2. Deskripsi tentang Kendala Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kendala yang dihadapi khususnya sarana dan prasarana yang masih terbatas, contohnya seperti alur masuk ke candi masih manual

[5] Yuli Hertawan, Kepala Dinas Pertanian, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, Senin, 7 Januari 2019, 12.15.

dengan menggunakan karcis, keinginannya dengan memakai prasarana putar otomatis yang mana disana bisa langsung terhitung jumlah orang yang masuk dan tidak selisih dengan penghasilan yang didapatkan. Kedisiplinan para petugas kurang dalam pengawasan. Sedangkan kendala yang dihadapi pada pariwisata kerbau rawa yaitu belum terkelola, sehingga belum ada pendapatan asli daerah terkait tempat itu. Karena kekurangan konsultan pariwisata yang bisa merencanakan bagaimana rute dan bagaimana tempat itu bisa dijadikan pariwisata untuk menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung untuk mengunjunginya.

a. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kendala adalah kondisi daerah salah satu, karena untuk kondisi tempat balai benih ikan bukanlah suatu lahan irigasi teknis sehingga untuk air hanya semata-mata mengharapkan sungai dan taduh hujan dan hanya pada musim-musim tertentu saja dapat berproduksi serta mereka tidak memiliki lahan irigasi.

b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun kendalanya adalah belum bisa mengelola dikarenakan peraturan belum ada dan laboratorium lingkungannya baru saja terbentuk, sehingga personil untuk itu belum ada.

c. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kendala yang dihadapi ada tiga, dari kondisi daerah, karena daerah rawa, dan daerah rawa ini diibaratkan itu juga seperti mangkok, jadi

daerah ini merupakan tumpukan alirannya, sehingga apabila datangnya air yang banyak karena hujan dan aliran air dari balangan dan tabalong tersebut daerah disini tidak bisa melakukan aktivitas betanam. Kemudian kendala dari segi manusia yaitu masyarakat para petani yang mana rata-rata mereka hanya berpikir yang penting cukup apa yang ada dan tidak ada rugi tanpa memikirkan keuntungan sehingga susah untuk memajukan daerah ini dalam sektor pertanian dan yang terakhir dari segi permodalan, karena keterbatasan modal juga.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti tulis dan sesuai dengan data visi MANTAP dan misi terkait nomor 6 yang bunyinya melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang mana hal tersebut menurut analisis hal itu sudah terjalankan, oleh karena itu peneliti wajib membahas tentang analisis data terkait hal itu guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, menurut peneliti sendiri adalah:

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Hulu Sungai Utara

   Menurut Peneliti, Pemerintah Daerah adalah orang yang menyelenggarakan setiap urusan daerah untuk rakyatnya sesuai dengan asas dan prinsip otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945.

Pendapat pertama dari informan pertama yaitu bagian hukum yang mana menurut peneliti bagian hukum merupakan suatu tempat informasi untuk mengetahui peraturan dalam pengupayaan daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, yang melalui peraturan tersebut dari dinas lain. Seperti didalam bab dua mengenai fungsi kepala bagian hukum yang dinyatakan salah satunya adalah koordinasi penyusunan produk hukum serta pengendalian implementasi produk hukum itu sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, peneliti menganggap bahwa kepala bagian hukum mempunyai informasi lebih mengenai peraturan yang ada di dinas yang peneliti tuju. Namun pada nyatanya, bagian hukum sampai sekarang belum mendapatkan salinan peraturan yang ada pada dinas yang peneliti tuju, peraturan yang terbaru yang masuk pada bagian hukum pada tahun 2018 hanya tentang pedoman pembentukan Peraturan Daerah, pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun anggaran 2018-2019, penyelenggaraan Kabupaten layak anak, rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2017-2022 dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018. Adapun fungsi bidang hukum terkait pengupayaan sumber daya alam adalah sosialisasi, yang mana sosialisasi dilakukan oleh bidang hukum dengan bekerja sama dengan dinas, badan atau pun lembaga lain yang merupakan suatu isu pemasalahan yang marak terjadi

pada saat itu, namun pada nyatanya sosialisasi tentang sumber daya alam di Kabupaten hulu sungai utara bukanlah suatu masalah sehingga jarang ada bahkan tak pernah selama ini yang dilakukan oleh mereka.

Pendapat kedua dari informan kedua yaitu bagian dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang mengatakan bahwa dinas upaya terkait sumber daya alam adalah terkait bidang air minum akan tetapi belum terealisasikan, dikarenakan pembangunan laboratorium baru dibangun, sehingga untuk pengelolaan belum ada dan peraturan belum ada,

Pendapat ketiga dari Informan ketiga pertama pariwisata candi agung dan yang paling berpotensi dan berpengaruh terkait pendapatan asli daerah, yang mana target pada tahun 2018 untuk pendapatan sudah tercapai, adapun tentang upaya yang akan dilakukan adalah:

a). Mendisiplinkan para petugas candi agung;

b). Mendisiplinkan para pengunjung dengan adanya sanksi yang dilanggar sesuai peraturan;

c). Penambahan sarana dan prasarana buat keluar masuknya pengunjung agar terhitung sesuai dengan nyatanya;

d). Melakukan perluasan parkir dan perluasan jalan tempat wisata candi agung;

e). Meningkatkan peran dari masyarakat becak guna kesejahteraan masyarakat;

f). Mencari seorang konsultan pariwisata dalam pengelolaan awal di kerbau rawa.

g). Melakukan pengembangan pemasaran terkait tempat pariwisata;

Dari beberapa upaya yang akan dilakukan oleh kepala dinas yang artinya telah terpenuhinya salah satu fungsi dan tugas kepala dinas yang merupakan seorang Pemerintah Daerah, antara lain artinya ia sudah melaksanakan fungsinya terkait pelaksanaan urusan ketatausahaan, perumusan kebijakan dibidang pariwisata, penyelenggaraan urusan pariwisata dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang berupaya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara guna dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan tugas dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh kepala dinas salah satunya telah terpenuhi terkait pengupayaan sumber daya alam pariwisata antara lain:

a). Telah ikut serta dalam mewujudkan visi dan misi bupati;

b). Mengkoordinasi kegiataan terkait bidang pariwisata;

c). Melaksanakan urusan ketatausahaan, pengawasan terhadap kedisiplinan kinerja bawahan.

Pendapat keempat dari Informan yang mengatakan adanya target yang akan dicapai salah satunya adalah terkait pendapatan asli daerah, yang mana pada tahun 2018 telah mencapai target dan ditahun 2019 ini target pendapatan asli daerah dinaikkan dengan menambah program kerja yang lebih baik lagi serta peningkatan para pegawai lebih giat lagi, adapun pengupayaan dari kepala dinas perikanan terkait peningkatan pendapatan asli

daerah tentunya tak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah yang mana termuat didalam Bab II Perbup Nomor 33 Tahun 2018. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah:

a). Pengadaan obat-obatan dan sosialisasi terkait hama penyakit ikan;

b).Pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan;

c). Meningkatkan teknologi perikanan;

d). Mengusahakan dengan cara membantu penyediaan sarana dan prasarana para nelayan;

e). Pembangunan tempat balai benih ikan dan gudang dingin ikan;

f). Pengoptimalan kerja dari sumber daya manusia.

Pendapat kelima dari Informan, menurut peneliti pertanian adalah sumber daya alam yang berpotensi tinggi di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dikarenakan mata pencaharian masyarakat paling banyak adalah petani selain dari nelayan. Sehingga dinas pertanian semaksimal mungkin untuk mengupayakan apa yang menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat guna mewujudkan visi dan misi bupati Hulu Sungai Utara. Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh bupati Hulu Sungai Utara kepada dinas pertanian sudah dijalankan seperti, kebijakan sarana dan prasarana, penyuluhan, pembinaan produksi pertanian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dinas pertanian seperti yang terdapat didalam Bab II. Program kerja yang dilakukan

oleh bidang masing-masing, yang mana di dalam Dinas Pertanian mencakup 5 bidang salah satunya adalah sekertaris, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan holtikultura, kesehatan dan bidang tanaman pangan dan penyuluhan. Untuk upaya yang akan dilakukan antara lain:

a). Membantu dalam permodalan kredit ke Bank;

b). Pembangunan tempat balai penyuluh pertanian perkecamatan;

c). Meningkatkan pertanian usaha rakyat;

d). Pembinaan dibidang teknis penyuluhan; dan

e). Mengusahakan pengoptimalan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

f). Melakukan bidang pemasaran hasil dari pertanian;

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan sumber daya alam, yang mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya untuk peningkatan tersebut antara lain:

a). Dari pendapat Informan kedua, kendala yaitu mengenai pengelolaan sumber air minum yang mana dikarenakan belum terkelola dengan baik pembangunan baru laboratorium dengan belum ada kebijakan dari atasan serta sumber daya manusia yang belum ada.

b). Dari pendapat Informan ketiga, terkhususkan pada sarana dan prasarana yang masih terbatas, kurangnya kedisiplinan para pengawas (pegawai kantor), dan belum terkelolanya pariwisata kerbau rawa dikarenakan belum ada konsultan pariwisata.

c). Dari Pendapat Informan keempat, kendala pada kondisi daerah dan tidak memiliki lahan irigasi, sehingga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu kesulitan, karena semua tergantung cuaca dan musim.

d). Dari pendapat Informan kelima, adapun kendala yaitu dari segi daerah yang rawa, dari sumber daya manusia, yang mana minsed yang berbeda dengan orang dinas dan terakhir adalah keterbatasan modal.

Dari beberapa analisis data yang telah peneliti teliti, sejalan dengan data yang ada, bahwa permasalahan yang banyak dialami para Informan dalam pengupayaan sumber daya alam adalah kesulitan dalam sarana prasarana kebutuhan dari dinas masing-masing, yang mana hal tersebut sejalan dengan menurut pendapat Mardiasmo yang terdapat didalam tulisan Bab II yang menyatakan salah satunya permasalahan dalam mengelola pendapatan asli daerah bahwa tingginya tingkat kebutuhan daerah serta lemahya infrastruktur sarana dan prasarana umum. Sedangkan dari rincian yang tergambar pula secara tiga tahun berturut-turut yang secara jelas telah nampak bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Daerah tertinggal.